

DISKURSUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh:
F a i z a l^{es}

Abstrak

Empowerment is the antithesis of the concept and implementation of community development that has been developed in the third world (developing countries), including Indonesia. The concept and implementation of development that is top down and makes economic growth as the orientation on achieving a fair and equitable prosperity, has ignored community participation and fostered dependency. Therefore, the empowerment that is *people centered*, *participative* and *sustainable*, can be used as alternative development model. And today empowerment as a paradigm, concepts and practices has been an interesting discourse among theorists and academics as well as practitioners and common public.

Kata Kunci: *pemberdayaan, pembangunan, partisipasi, dan keberlanjutan.*

A. Pendahuluan

Istilah pemberdayaan yang sedang tren dan menjadi perbincangan (diskursus) pada dua dasawarsa terakhir, sejak pertengahan tahun 1990-an bagaikan angin segar yang berhembus dibawah matahari yang panas menyengat. Indonesia bahkan dunia internasional menjadikan istilah pemberdayaan sebagai jargon pembangunan nasional diberbagai negara belahan dunia. Kelemahan bahkan kegagalan pembangunan dengan pendekatan

^{es}Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung

top down menumbuhkan keinginan untuk menggunakan paradigma yang lebih perpihak pada masyarakat, sebagaimana yang dirumuskan oleh Chambers, yakni pembangunan yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Sejalan dengan itu, Indonesia bahkan word bank dalam Buletin Vol. 11 No. 4/Vol. 2 No. 1 Oktober-Desember 2001 menetapkan pemberdayaan sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan. *people-centered, participatory, empowering, and sustainable* sebagai suatu prinsip dan proses dalam mencapai kesejahteraan (*welfare*) merupakan suatu tujuan yang diidam-idamkan masyarakat. Menurut Riyadi yang dikutip oleh Totok Mardikanto: “Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu yang ada di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”.¹

Dengan demikian, diskursus (*discourse*) tentang pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari paradigma perubahan sosial yang didasarkan pada realitas implementasi teori-teori pembangunan yang kurang berpihak pada kepentingan dan partisipasi masyarakat secara merata. Diskursus tersebut cukup beralasan, karena: *pertama*, paradigma dan atau aliran pembangunan yang berlangsung selama tiga (3) dasawarsa zaman orde baru dengan menggunakan *top down* sebagai pendekatan telah membelenggu kebebasan dan partisipasi masyarakat. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan *top down* sebagai pendekatan hanya mensejahterakan sekelompok orang atau pihak-pihak yang berkuasa atas kebijakan dan permodalan. *Ketiga*, orientasi pertumbuhan ekonomi lebih mengutamakan pembangunan ekonomi industri besar dan teknologi mesin yang memaksa Sumber Daya Manusia (SDM) lokal kehilangan lapangan pekerjaan dan hanya mampu menjadi obyek, buruh kerja, dan atau penonton. Hak kebebasan dan partisipasi terbelenggu oleh sistem yang mengatasmakan pembangunan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia yang berkeadilan.

¹Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3
Jurnal Pengembangan Masyarakat

Ketiga alasan tersebut di atas, menjadikan istilah pemberdayaan masyarakat sebagai diskursus dan kajian para ilmuwan sosial kemasyarakatan termasuk Perguruan Tinggi dan Pemerintah sebagai upaya merumuskan konsep dan implementasi program pembangunan yang bersipat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Oleh karena pada dua (2) dasa warsa terakhir, paradigma pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan tidak lagi menjadi wacana, tetapi telah diberlakukan dalam rangka pembangunan nasional. Walaupun demikian, dalam implementasinya, aliran pembangunan masa lalu masih terlalu kuat membayangkan-bayangi paradigma baru tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh data tentang jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa yang tergolong tertinggal (miskin). Tercatat terdapat 183 Kabupaten/Kota di Indonesia tergolong tertinggal.² dan terdapat 71.000 desa yang tergolong miskin.

Realitas tentang jumlah Kabupaten/Kota dan atau desa yang tergolong tertinggal atau miskin tersebut sebagai pertanda bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat yang telah diimplementasikan belum mampu berbicara banyak dalam menjawab permasalahan yang dialami masyarakat. Mungkinkah sebuah akibat dari kedangkalan pemahaman teori pemberdayaan atau karena masih dalam tahap transisi pemahaman dan sosialisai. Atau, boleh jadi terjadi kontradiksi antara teori-teori pemberdayaan masyarakat dengan para praktisinya. Oleh sebab itu, maka karya singkat ini akan membahas tentang diskursus pemberdayaan masyarakat, terutama diskursus pemberdayaan antara teori dengan praktek, sejarah perkembangan teori, dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

B. Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang mengutamakan peranserata lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Paradigma pemberdayaan dan pembangunan sama-sama bagian (model) implementasi teori perubahan sosial. Walaupun demikian, dalam tatanan realitas

²Medy Danial, 183 Daerah tertinggal, <https://www.academia.edu/4575172>, diakses pada tanggal 27 Mei 2015
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

menurut Mansour Fakih, ada jurang yang memisahkan antara teoritis dan kalangan akademisi dengan para praktisi pemberdayaan atau pembangunan yang bekerja bersama masyarakat marjinal, seperti kaum buruh, petani, nelayan, anak terlantar, dan masyarakat adat diberbagai daerah.³ Para teoritis dan akademisi berfikir dalam tataran obyektif dan idealitas, sementara para praktisi pembangunan yang didukung oleh elit politik dan atau pemerintah dan kaum bermodal dipengaruhi oleh kapitalism yang berupaya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan, teori yang digunakanpun adalah teori yang mendukung visi kapitalism.

Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.⁴ Pembangunan dalam pembinaan bangsa selaras dengan makna pembangunan menurut Totok Mardikanto : “Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara-terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.”⁵

Teori pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh Siagian tersebut berkembang pada abad 18 oleh Adam Smit (1776), seorang tokoh ekonomi klasik. Beliau berpendapat, bahwa proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang berarti terjadi peningkatan pendapatan dan perluasan pasar akan membuka inovasi-inovasi baru sebagai pendorong perluasan pembagian kerja dan

³Mansour Fakih, *Runtuhnya Reori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2011), h.1

⁴Taliziduhu Ndraha, *Materi Pokok Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986), cet. Ke-1, h. 1.5

⁵Totok Mardikanto, *op., cit.*, h. 6

mendorong pertumbuhan.⁶ Adam Amit berpendapat, bahwa *division of labour* sangat penting keberadaannya. Spesialisasi pekerja sebagai buruh menjadi keniscayaan dalam industri, walaupun pekerjaan buruh menimbulkan permasalahan, seperti rutinitas, membosankan, statis, beresiko pemutusan kerja.⁷

Misalnya, Rostow seorang ekonom Amerika Serikat yang kemudian dikenal sebagai bapak pembangunan dunia. Rostow (1960) mengemukakan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi, yakni: *Pertama*, masyarakat tradisional (*traditional society*), masyarakat yang mengandalkan usaha pertanian sebagai sumber kehidupan dan mengandalkan tenaga fisik dalam berusaha. *Kedua*, persiapan menuju tinggal landas (*precondition for growth, the take off*), masyarakat yang mulai menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri. *Ketiga*, tinggal landas (*the take off*), pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pembangunan sektor industri. *Empat*, masyarakat dewasa (*the drive to maturity*), menggunakan teknologi modern dalam semua aktivitas ekonomi. *Kelima*, masyarakat konsumsi tinggi (*the off high mass consumption*), masyarakat hidup dengan pola konsumsi tinggi untuk produksi dan jasa.⁸ Dan Indonesia salah satu negara yang menggunakan teori tahapan ekonomi tersebut, sehingga Presiden Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan di Indonesia termasuk kabinetnya pun disebut kabinet pembangunan.

Serangkaian teori atau konsep pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi yang menjadi ujung tombak pembangunan pada era Orde Baru, kemudian dianggap gagal karena mengabaikan keadilan sosial (*social justice*) yang bersifat kontinyu (*sustainable*). Walaupun demikian, teori pertumbuhan tetap eksis hingga tahun 1970-an. Diperparah lagi ketika program pembangunan yang digagas oleh pemerintah dengan dalih demi kesejahteraan masyarakat, sementara dalam implementasinya dilaksanakan secara sepihak oleh para praktisi yang dekat dengan pemerintah dan elit politik. Yang berkembang adalah program pemerintah atau kontraktor/pemborong bukan program masyarakat, sehingga ketergantungan membelenggu kreativitas,

⁶*Ibid.*, h. 13

⁷Mansour Fakih, *Op., Cit.*, h. 46-47

⁸*Ibid.*, h. 55-56

baik kreativitas dalam berkarya maupun kreativitas dalam menjaga dan melestarikan hasil pembangunan.

Banyak pandangan yang berkembang dalam teori-teori pembangunan pada dasawarsa 1940-1970, konsep pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi tidak mampu mensejahterakan masyarakat mayoritas secara merata. Hasil pembangunan hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan (finansial, politik, kolega) yang berkuasa atas pembangunan dan hasilnya. Oleh karena itu, berkembang berbagai pemikiran untuk mencari alternatif terhadap paradigma yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Korten (1984) mengemukakan teori baru guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, berkeadilan, dan berkelanjutan yang kemudian dikenal dengan pembangunan berpusat manusia (*people centered development*).⁹ Dan, menurut Moeljarto Tjokrowinoto dalam Totok Mardikanto, pembangunan berpusat pada manusia mempunyai lima ciri sebagai berikut: *Pertama*, prakarsa dalam pengambilan keputusan diletakkan pada masyarakat. *Kedua*, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber daya lokal. *Ketiga*, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal. Oleh karenanya, sifatnya fleksibel disesuaikan dengan kondisi lokal. *Keempat*, menekankan pada proses pembelajaran sosial yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dengan komunitas. *Kelima*, pembentukan jaringan antara birokrasi, lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional secara integral.¹⁰

Proposisi di atas mengindikasikan bahwa inti pembangunan berpusat pada manusia adalah pemberdayaan (*empowerment*). Oleh karena itu, pada tahun 1990-an pemberdayaan diyakini sebagai alternatif pembangunan yang mengedepankan partisipasi (*participation*) masyarakat.

Konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat mayoritas dibangun atas kerangka logik sebagai berikut: *Pertama*, proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor

⁹Totok Mardikanto, *Op., Cit.*, h. 17

¹⁰*Ibid.*, h. 18

produksi; *Kedua*, pemusatan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; *Ketiga*, kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; *Keempat*, pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.¹¹ Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.¹²

Makna yang begitu detail dan terkonsepsi sebagai visi perubahan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat berubah terbalik menjadi visi pribadi atau sekelompok orang.

Permasalahan-permasalahan tersebut, menurut Mansour Fakih,¹³ terjadi karena beberapa hal, yakni: *pertama*, adanya ketimpangan antara akademisi dan Perguruan Tinggi dengan praktisi pemberdayaan atau perubahan sosial tentang pemahaman teoritis dan paradigma pemberdayaan. Para akademisi dan Perguruan Tinggi mempunyai kebebasan dan kesempatan dalam memperoleh informasi melalui literatur, diskusi, dan penelitian tentang berbagai teori pemberdayaan. Sementara, para praktisi pemberdayaan, seperti Organisasi (Lembaga) Sosial Kemasyarakatan (LSM) dan para pekerja sosial atau fasilitator mempunyai intensitas yang tinggi dalam aksi pemberdayaan, tetapi kurang memiliki ruang untuk memahami teori-teori pemberdayaan sebagai salah satu bentuk perubahan sosial. *Kedua*, terjadi perbedaan antara tujuan teoritis yang dikawal oleh akademisi dan Perguruan Tinggi dengan tujuan praktis yang dilakukan oleh para praktisi. Para praktisi bekerja kurang dilandasi pemahaman teoritis dan visi ideologis tentang perubahan sosial.

¹¹Aprillia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92

¹²*Ibid.*, h. 93-94

¹³Mansour Fakih, *Op., Cit.*, h. 2-3

Secara metodologis, kedua faktor di atas mempengaruhi desain program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, para praktisi cenderung menjadikan masyarakat sebagai obyek. Proses merencanakan, menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi hasil tanpa melibatkan masyarakat (*top down*). Oleh sebab itu, dalam berbagai literatur, pendapat, dan asumsi, para pakar dan pemerhati pembangunan nasional menganggap bahwa program pembangunan dalam melakukan visi perubahan sosial belum berhasil. Karena, konsepsi mengenai pendekatan, strategi, dan orientasinya tidak mengikuti prosedur teoritis yang benar dan atau dengan sengaja memihak teori-teori yang mengabaikan keadilan dan kemanusiaan.

Harus disadari bahwa teori-teori yang kita jumpai dirumuskan oleh para teoritis-teoris yang berbeda latar belakang, baik ideologi, ekonomi, pendidikan, politik, budaya, dan sebagainya. Tidak semua teori dapat sesuai dengan situasi dan kondisi dimana teori tersebut diimplementasikan. Misalnya, dewasa ini ada dua aliran teori sosial yang kontradiktif, yakni teori-teori sosial yang digolongkan dalam *teori sosial relegius* dan *teori-teori sosial emansipatori* yang dikenal dengan *aliran kritis*.¹⁴

Teori sosial relegius adalah teori sosial yang bersombayan bahwa ilmu sosial harus mengabdikan pada stabilitas, pertumbuhan, dan pembangunan. Bersifat obyektif dan secara politik netral dan bebas nilai. Pandangan ini menjadikan teoritis sebagai pengontrol dan masyarakat sebagai obyek. Rekayasa sosial sebagai pengembangan teori sosial relegius berupaya menjadikan masyarakat sebagai obyek yang selalu direncanakan, diarahkan, dan dibina sesuai keinginan yang mengontrol.

Teori sosial kritis adalah aliran yang berupaya melakukan penyadaran kritis terhadap sistem dan struktur sosial "*dehumanisasi*" yang bersifat membunuh. Oleh sebab itu, teori ini berfaham bahwa teori sosial harus memihak, subyektif, dan syarat dengan nilai-nilai demi kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Teori sosial harus memihak dan mengabdikan demi kepentingan golongan yang lemah dan tertindas dan golongan yang menindas. Karena, keduanya

¹⁴ *Ibid.*, h. 8-9

harus mendapatkan penyadaran berdasarkan kritik terhadap situasi sosial yang ada.

Teori sosial kritik yang bersifat memihak dan subyektif merupakan salah satu faktor yang menginspirasi teori-teori pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan prinsip-prinsip dalam implementasi teori dan konsep pemberdayaan masyarakat. Prinsip sangat *urgent* dalam setiap aktivitas dan tujuan aktivitas, karena prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Dahama dan Bhatnagar dalam Totok Mardikanto, mengidentifikasi 12 prinsip dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam buku yang sama, Totok Mardikanto, mengidentifikasi 10 prinsip pemberdayaan yang suguhkan Soedijanto,¹⁵ diantaranya; berorientasi pada membangun kapasitas, menumbuhkan partisipasi masyarakat, berkelanjutan.

a. Berpusat Pada Masyarakat (*People of Centered*)

Permasalahan yang dihadapi negara-negara dunia ke-tiga (negara-negara berkembang) termasuk Indonesia adalah masalah keterbelakangan. Indikator-indikator keterbelakangan masyarakat ditandai dengan rendahnya pendapatan, rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi oleh penyerapan tenaga kerja, kemampuan untuk mendapatkan kesehatan rendah, dan lain sebagainya. Dan, dari berbagai indikator tersebut, SDM menjadi indikator yang paling berpengaruh terhadap indikator-indikator lainnya.

Keterbelakangan atau kerap disebut kemiskinan merupakan akibat dari pembangunan yang menggunakan pendekatan *buttam up* yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, yakni pendekatan dan orientasi yang mementingkan hasil dan mengabaikan masyarakat mayoritas dalam proses. Sehingga, masyarakat mayoritas terbelenggu dalam ide dan kreativitas (pasif), kurang dalam pengetahuan dan pengalaman. Hal ini sesuai dengan tiga (3) dari lima (5) ciri pembangunan berpusat pada manusia yang dirumuskan oleh Moeljarto Tjokrowinoto dalam Totok Mardikanto, sebagai berikut: *Pertama*, prakarsa dalam pengambilan

¹⁵Totok Mardikanto, *Op. Cit.*, h. 105-109
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

keputusan diletakkan pada masyarakat. *Kedua*, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber daya lokal. *Ketiga*, menekankan pada proses pembelajaran sosial yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dengan komunitas.¹⁶ Dengan kata lain, pembangunan berpusat pada masyarakat atau *empowerment* menjadikan masyarakat menjadi aktor dan penentu pembangunan.

Untuk menjadikan individu-individu dalam masyarakat sebagai aktor dan penentu pembangunan harus diimbangi dengan upaya memperkuat kemampuan dan posisi tawar (penguatan kapasitas) masyarakat yang menjadikan mereka lebih berdaya. Prakarsa dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kapasitas (pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan). Karena, menurut Eltizoni dalam Polama: “pengetahuan harus dipraktekkan, pengetahuan dilaksanakan melalui proses pengambilan keputusan, terutama melalui komitmen-komitmen masyarakat yang abstrak dan samar yang arahnya ditentukan oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dianut oleh pelaku, diterjemahkan kedalam komitmen-komitmen spesifik pada rangkaian tindakan yang lebih spesifik”.¹⁷

Proses pengambilan keputusan yang begitu rumit hampir tidak mungkin dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat yang kurang dalam kesadaran. Oleh karena itu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan harus didahului dengan penguatan kapasitas dalam hal kesadaran. Menurut Eltizoni dalam Polama, pelaku yang dasar akan lingkungan dan dirinya serta terhadap kontrol internalnya akan lebih aktif ketimbang aktor yang karakteristik serupa tetapi tidak memiliki kesadaran.¹⁸ Kesadaran dan aktivitas lanjut Eltizon, memiliki proposisi-proposisi, seperti: *Pertama*, peningkatan kesadaran yang diharapkan akan melahirkan gerakan yang hanya terjadi apabila elemen-elemen lain dari orientasi aktif juga meningkat atau elemen-elemen lain yang lebih tinggi dibanding dengan kesadaran kemesyarakatan. *Kedua*, bilamana tingkat kesadaran tinggi tetapi tingkat komitmen rendah, akan melahirkan masyarakat yang acuh tak acuh. *Ketiga*, bila tingkat

¹⁶*Ibid.*, h. 18

¹⁷Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003), h. 361

¹⁸*Ibid.*, h. 360

kesadaran tinggi, tetapi tingkat pengetahuan rendah berakibat pada mempertinggi rasa ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah-masalah sendiri.

Kesadaran akan realitas lingkungan dan dirinya menumbuhkan keberanian seseorang dalam mengambil keputusan dan mendorong seseorang untuk memperkuat kapasitas sebagai instrumen pengelolaan dan memobilisasi sumber daya lokal. Menurut Aprelia Theresia, pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas dibagi menjadi pengembangan kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan, dan kapasitas kelembagaan.¹⁹ Setiap kapasitas berorientasi pada penguatan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan.

Pengembangan kapasitas manusia merupakan kegiatan pengembangan yang berorientasi pada: *Pertama*, pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan kapasitas keprofesionalan. *Kedua*, pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi; (1) kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi; (2) kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi; (3) proses organisasi atau pengelolaan organisasi; (4) interaksi antar individu di dalam organisasi; (5) pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya; dan (6) interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Ketiga, pengembangan kapasitas sistem (jaringan), meliputi: pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama dan dengan entitas/organisasi di luar sistem.

Selanjutnya, pengembangan kapasitas usaha, yakni pengembangan yang diawali dari proses pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan, pembentukan badan usaha, pengelolaan investasi sampai pada manajemen pengelolaan usaha, manajemen sistem informasi dan jaringan kemitraan.

Lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial merupakan aset lokal yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya lingkungan dalam menciptakan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontinyu (*sustainable*) merupakan

¹⁹Aprelia Theresia, *Op., Cit.*, h. 155-159
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

keniscayaan. Masyarakat yang kurang menyadari akan dampak dari aktivitas ekonomi (pertanian, peternakan, dan industri) akan menimbulkan kerusakan lingkungan, polusi udara dan air, yang pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya masalah-masalah sosial, seperti ketersinggungan, hubungan sosial, bahkan konflik sosial.

Pengembangan kapasitas manusia, kapasitas usaha, dan kapasitas lingkungan akan menjadi efektif apabila ada ketersediaan lembaga (*institution*), baik yang bersifat formal maupun non formal atau institusi sosial berupa pranata-pranata sosial yang memfasilitasi berbagai kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

b. Partisipasi (*Participation*)

Pemberdayaan yang berpusat pada manusia (*people centered*) bertujuan memperkuat kapasitas (kemampuan), baik yang bersifat pengetahuan (*knowlage*) dan keterampilan (*skill*) maupun pengalaman. Berbagai kemampuan yang dihasilkan dari proses pembelajaran (teoritik dan praktik), sangat *urgent* bagi subyek pembangunan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam implemtasi program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Mulyasa yang dikutip oleh Karna Sobahi, mengemukakan bahwa pada era otonomi daerah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil berdasarkan pada kebutuhan secara nyata dan langsung dari masyarakat bawah (*grass-rood*), sehingga tingginya partisipasi masyarakat dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang diambil pemerintah.²⁰ Partisipasi dalam pengertian keterlibatan secara individu maupun kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas pemberdayaan. Menurut Adam dalam Karna Sobahi, partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi, baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan serta ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.²¹ Oleh sebab itu, pengembangan kapasitas sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak hanya fokus

²⁰Karna Sobahi dan Cucu Suhana, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: CV. Cakra, 2011), h. 118

²¹*Ibid.*, h. 116

pada pengembangan kapasitas yang bersifat pisik (kemampuan teknis), tetapi juga fokus dalam pembentukan karakter (kepribadian). Kepribadian seseorang menggambarkan sikap mental dan pikiran fasilitator (subyek) pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari sifatnya, menurut Koentjoro Ningrat, keterlibatan dibagi menjadi dua, yakni bersifat *kuantitatif*, yakni partisipasi dilihat dari frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam implementasi program. Keterlibatan yang bersifat *kualitatif*, yakni partisipasi yang dilihat dari tingkat dan derajat partisipasi. Sedangkan menurut Thoha, partisipasi masyarakat dapat bersifat partisipasi secara mandiri, partisipasi mobilisasi, dan partisipasi seremoni.²² Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari aktif atau pasifnya seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi mobilisasi dan seremoni menjadi ciri khas pendekatan *top down* yang sengaja diciptakan. Sementara, partisipasi mandiri menjadi ciri khas pemberdayaan. Penomena perubahan sosial yang terjadi dewasa ini, masih minimnya program pemerintah yang mendudukan masyarakat mayoritas sebagai subyek pembangunan. Yang ada adalah program yang secara totalitas diprakarsai oleh masyarakat. Misalnya, tumbuhnya desa-desa wisata di daerah Yogyakarta, didasarkan pada prakarya masyarakat lokal dan pemerintah baru terlibat ketika desa –desa tersebut telah berkembang.

Berbicara aktivitas, menurut Eltizoni dalam Margaret M. Polama, orientasi aktif memiliki tiga (3) komponen, yakni: kesadaran pribadi, pengetahuan para aktor dan komitmen pada satu atau lebih tujuan yang harus dicapai, serta fasilitas kekuasaan untuk mengubah tatanan sosial.²³ Dengan kesadaran, pengetahuan, dan kekuasaan diyakini akan terjadi transpormasi atau perubahan pada masyarakat. Karena, transpormasi merupakan penjelajahan suatu masyarakat yang mengenal dirinya sendiri, dengan maksud untuk mewujudkan nilai-nilai yang lebih sempurna: merasa pentingnya transpormasi dilakukan dan mampu mengukur

²²*Ibid.*, h. 119

²³Margaret M. Polama, *Op., Cit.*, h. 355
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

kemampuan-kemampuannya demi terlaksananya perubahan, bila tidak, masyarakat dengan sendirinya akan menjadi hancur.²⁴

Kesadaran untuk berpartisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban. Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak serta tanggung jawab untuk berpartisipasi.²⁵ Dan, keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menentukan nasibnya sendiri akan berhasil jika mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang resiko dan konsekuensi dari suatu keputusan tertentu. Untuk membuat keputusan yang didasari informasi mensyaratkan penyadartahuan dan pendidikan pada tingkat tinggi dalam arti luas, termasuk peningkatan kesadaran.²⁶ Juga, yang tidak kalah pentingnya dalam hal partisipasi adalah kekuasaan (*Power*). Kekuasaan bisa saja ada pada pihak elit juga bisa ada pada masyarakat. Dalam istilah yang digunakan oleh Jim Ife adalah *demokrasi representatif* dan *demokrasi partisipatif*. Dalam *Demokrasi partisipatif* rakyat berpartisipasi langsung dalam membuat keputusan untuk diri atau kelompoknya, sedangkan *demokrasi representatif*, rakyat hanya diberi pilihan-pilihan dalam menentukan keputusan.²⁷ Keduanya dapat berlaku dalam masyarakat, karena partisipasi masyarakat dapat bersifat mandiri atau partisipasi yang didasarkan pada inisiatif, dilaksanakan, dirasakan, dan dinilai oleh masyarakat secara mandiri atau tumbuh dari bawah. Juga dapat bersifat mobilitas atau didasarkan inisiatif pihak lain yang melakukan mobilisasi.

Partisipasi masyarakat dalam suatu proses dapat dilakukan dalam berbagai momen atau disebut oleh Aprelia Theresia lingkup partisipasi. Lingkup partisipasi dimaksud adalah: (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; (b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; (c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi; (d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.²⁸ Sementara,

²⁴*Ibid.*, h. 356

²⁵Jim Ife, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, tej. Oleh Sastrawan Manullang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 292

²⁶*Ibid.*, h. 291-292

²⁷*Ibid.*, h. 286-287

²⁸Aprillia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 198-199

partisipasi dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan, seperti: (a) Menjadi anggota kelompok; (b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi; (c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi; (d) Menggerakkan sumber daya masyarakat; (e) Memanfaatkan hasil-hasil kegiatan masyarakat.²⁹

c. Berkelanjutan (*Sustainability*)

Salah satu kegagalan para praktisi pembangunan dalam mengimplementasikan teori-teori perubahan sosial adalah menciptakan suatu program yang dapat dinikmati masyarakat dalam waktu panjang. Konsep *trickle down effect* bukan hanya dilakukan oleh orang atau kelompok orang tertentu dan hasilnya pun hanya dinikmati orang atau kelompok orang-orang itu juga, tetapi juga telah mengabaikan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat. Yang berarti proses, baik perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi hanya bersifat sementara. Keistimewaan prinsip keberlanjutan adalah dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan. Sebab, akan tercipta masyarakat yang kuat, seimbang, dan harmonis. Kuat karena tidak tergantung pada pihak lain,³⁰ seimbang dan harmonis karena dilakukan secara proporsional dan bersama-sama. Bahkan, program yang berkelanjutan dan mengutamakan partisipasi masyarakat akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan perbaikan.³¹

Menurut Brundtland Commission, pembangunan yang berkelanjutan adalah praktek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup.³² Pembangunan berkelanjutan, meliputi tiga dimensi, yakni dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial. Dimensi lingkungan, meliputi 4 dimensi, yakni keberlanjutan lingkungan alam, sumber daya alam, daya dukung alam, dan pelayanan alam.

²⁹*Ibid.*, h. 200

³⁰Suetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 354

³¹*Ibid.*, h. 355

³²Zubaiedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 187
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

Dalam terminologi ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak pernah punah.³³ Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks hubungan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial dapat direalisasikan jika didukung oleh empat kebijakan ekonomi:

- a. Intervensi pemerintah secara terarah
- b. Pemerataan pendapatan
- c. Penciptaan kesempatan kerja
- d. Pemberian subsidi bagi kegiatan pembangunan yang diperlukan.³⁴

Sementara itu, tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks hubungan antara tujuan sosial dan ekologi dapat direalisasikan jika didukung oleh dua kebijakan, yakni kebijakan yang menumbuhkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam memelihara keselamatan lingkungan serta kebijakan yang menumbuhkan pelayanan konsultasi tentang kesadaran lingkungan.

C. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan. Dia muncul dan berkembang berdasarkan analisis kritis terhadap teori dan praktik serta realitas sosial kemasyarakatan sebagai cerminan proses dan hasil pembangunan. Pembangunan dalam tatanan teoritis dan praktik telah terkonseptualisasikan dengan menggunakan pendekatan *top-down* dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga, baik dalam konsep maupun prosesnya para elit pemerintah, elit politik, pengusaha, dan praktisi pembangunan dengan sengaja membelenggu demokrasi dan partisipasi masyarakat mayoritas, menciptakan sifat ketergantungan, serta tidak tahan lama.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan *bottom up* dan berorientasi pada proses pengembangan manusia (individu dan kelompok), partisipasi, program yang berkelanjutan menjadi prinsip utama pemberdayaan masyarakat.

³³*Ibid.*, h. 148

³⁴*Ibid.*, h. 151

Prinsip-prinsip pemberdayaan yang secara teoritis berpihak pada kepentingan masyarakat mayoritas menjadikan pemberdayaan model alternatif pembangunan yang diperbincangkan oleh para teoritis dan akademisi, karena dalam implementasinya, para praktisi masih dibayang-bayangi oleh paradigma pembangunan dengan pendekatan *top down*. Walaupun ada yang berhasil, semata-mata didasarkan partisipasi secara mandiri oleh masyarakat.

Daftar Bacaan

- Aprillia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Jim Ife, *Community Developmen: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, tej. Oleh Sastrawan Manullang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Karna Sobahi dan Cucu Suhana, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Bandung: CV. Cakra, 2011
- Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Reori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2011
- Medy Dania, 183 Daerah tertinggal, <https://www.academia.edu/4575172>, di akses pada tanggal 27 Mei 2015
- Suetomo, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Taliziduhu Ndraha, *Materi Pokok Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986, cet. Ke-1
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Zubaiedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013